



DPR Sudah Tidak Mewakili Rakyat Lagi

Medan, MIMBAR - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini dinilai tidak mewakili rakyat kecil lagi dan mayoritas justru lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Romo Magnis Suseno, menuturkan, dia pernah ikut tim untuk menyelamatkan KPK yang dianggap telah dikebiri oleh pemerintah, usai DPR RI membuat UU yang baru untuk KPK.

Namun usaha itu sia-sia, lantaran Presiden Joko Widodo yang saat itu berbingcing dengan 70 ahli

dan pakar, dirinya, di istana negara, ternyata tidak menghentikan UU yang baru diputus itu.

"Presiden mendengarkan dengan baik-baik, kami mengusulkan membuat Perppu, yang untuk sementara menghentikan UU yang baru diputuskan, supaya KPK tetap kuat, karena pada saat itu KPK bekerja sangat bagus

■ Bersambung ke Hal 11



Dugaan Komplotan Pejabat Batubara Menangkan 02

Bawaslu Bertindak

Medan, MIMBAR - Rekaman pembicaraan para pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diduga memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) capres cawapres nomor urut 02 pada Pilpres 2024 viral di media sosial.

■ Bersambung ke Hal 11

Prabowo Subianto kali pertama datang ke Sumatera Utara sejak ditetapkan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto datang untuk melakukan konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju, relawan, dan masyarakat Sumatera Utara. (Foto liputan6.com)

Mobil Ketua Relawan Prabowo-Gibran Ditembak OTK

Terjadi Saat Salat Subuh

Saya cek dan ternyata ada proyektil peluru dalam mobil."

Jabal Nur

Ketua tim Garda Prabowo-Gibran SulSel

"Saya lagi salat subuh dekat situ. Terus adek saya lagi di ATM tarik uang. Jadi saat penembakan tidak ada orang di mobil," kata Jabal.

Setelah melaksanakan salat Subuh, dia bersama adiknya lalu kembali ke rumah. Saat itu mereka belum mengetahui mobilnya ditembak OTK. Hal itu baru

■ Bersambung ke Hal 11

Polda Sumut Tangkap Kadisdik Madina

Diduga Minta Uang ke Peserta Seleksi PPPK

Medan, MIMBAR - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Dollar Hafriyanto Siregar (DHS) menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus seleksi Pegawai Pemerin-

tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Madina.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari pengaduan warga yang menduga ada pelanggaran dalam seleksi PPPK di

Madina. Atas aduan tersebut pihak kepolisian lalu melakukan penyelidikan hingga menangkap Dollar Hafriyanto Siregar (DHS).

"Itu kan ada pengaduan masyarakat. Kemudian, polisi melakukan langkah-langkah penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.

"Mulai hari ini DHS ditahan," kata Kabid



Polda Sumut menahan Kadisdik Madina Dollar Hafriyanto Siregar atas perkara dugaan suap. (Foto ist)

■ Bersambung ke Hal 11



Romo Magnis Suseno mengaku dirinya akan tetap kritis terhadap pemerintah meski dirinya telah menerima penghargaan oleh Presiden Joko Widodo hari ini. (Foto Ist)

Pengancaman Tembak Anies

Timnas AMIN Dorong Penyelesaian Lewat RJ

Jakarta, MIMBAR - Pria yang mengancam hendak menembak capres nomor urut 01 Anies Baswedan diamankan polisi di Jawa Timur. Pemilik akun TikTok yang mengancam Anies tersebut kini ditahan.

Namun Tim Pemenangan Nasional (Timnas)

Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendorong agar kasus tersebut diselesaikan lewat restorative justice. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir.

■ Bersambung ke Hal 11



Tersangka yang ingin menembak Anies.(net)

Sentilan Eks Panglima Kepada Jokowi

Cari Kerja Susah, Presiden Sampai Carikan Kerja untuk Anaknya

EKS Panglima TNI, Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo, menghadiri diskusi bertajuk 'Selamatkan Pemilu yang Demokratis', di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Dalam paparannya, Gatot sempat berseloroh bahwa saat ini merupakan masa yang sulit dalam mencari pekerjaan. Bahkan, lanjut dia, seorang presiden juga ikut mencari pekerjaan untuk anaknya. "Saya bertanya ke adik-adik, kamu mau jadi apa kalau sudah lulus? Cari kerjaan susah, lo, zaman

sekarang," kata Gatot.

"Saking susahannya, presiden juga cari kerja untuk anaknya," lanjutnya disambut tawa dari para peserta yang hadir.

Pernyataan itu mengarah pada pencalonan putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pencalonan tersebut sempat menuai polemik. Mulanya, ia terbentur aturan soal batas usia minimal 40 tahun untuk maju dalam Pilpres. Sementara, usianya belum cukup.

Aturan tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, pada pertengahan Oktober silam. Anwar Usman juga merupakan ipar dari presiden Jokowi.

■ Bersambung ke Hal 11

LUAR NEGERI

Israel Lanjutkan Perang di Gaza

Tak Peduli Mahkamah Internasional

Medan, MIMBAR - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tidak ada hal yang bisa menghentikan negaranya untuk menumpas habis Hamas di Jalur Gaza. Dia menyebut, keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang berbasis di Den Haag, Belanda, juga tidak akan menghentikan misi Israel.

"Tidak ada seorang pun yang akan menghentikan kami, baik Den Haag, Poros Kejahatan, dan tidak ada orang lain. Hal ini (perang di Gaza) mungkin dan perlu untuk dilanjutkan sampai

■ Bersambung ke Hal 11



■ Kadang jadi juru bicara penguasa ...
■ Hehehe ...

Jadwal Salat

4 RAJAB 1445 H

Subuh : 05:16 WIB	Maghrib : 18:35 WIB
Zuhur : 12:37 WIB	Isha : 19:48 WIB
Ashar : 16:00 WIB	■ Untuk Kota Medan sekitarnya

Hidayah Siddiq

Oleh Dr A Rasyid, MA



MENJELANG pemilihan umum, orang-orang cenderung bicara mengenai siddiq. Kata siddiq dikitikan dengan tipe atau sosok yang dianggap penting bagi seorang pemimpin, terutama pemimpin negara. Seakan yang tidak siddiq tidak layak dan pantas dipilih atau diberi jabatan pemimpin. Ini artinya begitu pentingnya sifat siddiq tersebut.

Sekarang mari kita pahami baik makna siddiq tersebut. Siddiq itu berasal dari bahasa Arab

■ Bersambung ke Hal 11

Bawaslu Bertindak

Dari Halaman 1

Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Dapari Lubis mengaku sudah mendengar kabar viral itu. Dia sudah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal. "Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," ungkapnya. Ahad (14/1).

Aswin menambahkan, saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Hasil penelusuran dari Bawaslu, kata dia, akan dikaji kembali. "Saya sampaikan ke Bawaslu Batubara agar membuat laporan hasil pengawasan terkait hal itu dan lakukan penelusuran dan kajian. Perkembangan selanjutnya kami juga sedang menunggu," paparnya.

Sebelumnya, video percakapan pejabat di Batubara Sumut diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1).

"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di

Batubara," tulis akun tersebut. Dalam postingan tersebut, terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

"Ya tambah tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing," ujar suara dalam video itu.

Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024. "Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya

Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.

"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasion-

alnya operasional mereka," sebutnya.

Pihak yang memberikan arahan dalam percakapan itu juga menambahkan tidak akan ada pemeriksaan terkait Pilpres 2024 asalkan komitmen memenangkan pasangan capres-cawapres sesuai rencana.

"Dan ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi. Tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan ya kita pun harus komitmen juga lah. Jangan nanti macam tahun tahun kemarin. Siram siram katanya. Siram 10 masuk 40. Kalah juga kalah ya tak disiram," urainya.

Merespons hal itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan suara dalam video viral itu bukan suara dari Kapolres Batubara maupun Forkompinda.

"Suara-suara itu bukan suara Kapolres atau Forkopimda. Nanti jam 1 kapolres, dandim, kajari akan prescon menjelaskan," terangnya.

HOAKS

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto

melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan memastikan bahwa video itu hoaks.

"Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," ungkapnya.

Yos A Tarigan menambahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan agar Kejati Sumut untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dimaksud dan sudah dilakuk-

kan. "Pak JA (Jaksa Agung) juga menyarankan untuk dilakukan klarifikasi dengan media, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan memastikan bahwa video itu hoaks. "Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," ungkapnya. Yos A Tarigan menambahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan agar Kejati Sumut untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dimaksud dan sudah dilakuk-

bang menjadi fitnah di tengah situasi politik saat ini," urainya.

Yos menyebutkan, Kajati Idianto terus mengingatkan jajaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Sumut agar menjaga netralitas. "Kami tetap menjaga netralitas sebagaimana imbauan pak Jaksa Agung dan kalau ditemukan adanya tindakan yang tidak netral akan ditindak tegas. Pak Kajari (Batubara) juga sudah menyampaikan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batubara," pungkasnya. (cnni/js)

Mobil Ketua...

Dari Halaman 1

diketahui saat mereka tiba di rumah dan menemukan proyektil peluru di dalam mobil. "Saya cek dan ternyata ada proyektil peluru dalam mobil. Tapi, pelurunya itu agel (jenis peluru)," sambung caleg DPR RI dari partai PAN itu.

Beruntung, tidak ada korban peristiwa itu. Dia curiga penembakan itu dilakukan dalam jarak dekat.

DIDUGA MOTIF POLITIK

Jabal Nur menduga telah menjadi target dari OTK. Motifnya, diduga kuat ada kaitannya dengan politik.

"Dugaan sementara, bisa jadi ada keterkaitan dengan politik. Saya kan Ketua Tim relawan Garda Prabowo-Gibran juga di Sulsei," bebemnya.

Ia berharap polisi segera mengungkap dan bahkan menangkap pelakunya. "Saya sudah melapor di polisi dan juga serahkan proyektil pelurunya. Semoga cepat ditangkap," harap dia.

Sementara, terkait penembakan mobil Ketua Relawan Garda Prabowo-Gibran Sulawesi Selatan itu, Kapolres Bantaeng, AKBP E. Jacky T. Umbu Kaledi enggan berkomentar banyak. Dia hanya menyebut tengah menyelidiki informasi tersebut. "Sementara kami cek kebenaran infonya. Hasil segera kami kabari. Terima kasih," singkatnya. (kum/js)

DPR Sudah...

Dari Halaman 1

sekali. Tapi ternyata tidak jadi," kata Romo Magnis, dikutip dari akun Youtube Media Indonesia, Minggu (14/1).

Romo Magnis pun mempertanyakan fungsi DPR RI yang dianggapnya tidak memihak rakyat kecil lagi, terlebih dengan adanya pegebirian KPK lewat UU yang disahkan DPR RI.

"DPR itu kalau kita tanya, oposisi di mana? Rakyat juga tidak dengar apa-apa tentang DPR, ada yang kena korupsi, mereka mewakili siapa? Siapa yang mewakili rakyat kecil, siapa yang mewakili petani? Tidak ada partai yang bekerja untuk rakyat," sesalnya.

Menurut dia, DPR saat ini justru mewakili para oligarki yang berkuasa lewat partai politik, bahkan pemerintahan. Sebab itu dia berharap, ke depan Indonesia bisa lebih baik dan mampu melakukan perubahan besar.

"Saya hanya bisa mengharapkan bagaimana pada pemilihan umum nanti kita mencapai suatu perubahan," tutupnya. (rum/js)

Cari Kerja...

Dari Halaman 1

ADVERTISEMENT

Gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu yang dikabulkan itu memutuskan bahwa mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Dari putusan 90, Gibran akhirnya maju di Pilpres 2024. Ia menjadi cawapres 02 mendampingi Prabowo Subianto. (kum/js)



Siddiq

Dari Halaman 1

yang berarti "benar". Istilah yang ada dalam Islam ini diberikan sebagai gelar kehormatan kepada individu tertentu.

Gender feminin untuk Siddiq adalah Siddiqah. Kata ini kadang-kadang digunakan sebagai gelar yang diberikan kepada individu oleh Muhammad, menurut sumber-sumber Islam. Jika tidak, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar dapat dipercaya.

Persoalan kepercayaan tentu saja dapat dipastikan suatu hal mutlak dalam kehidupan kita kebangsaan dan bernegara, karena negara kita menggunakan model demokrasi, bukan model kerajaan. Negara demokrasi berarti negara bukan milik pribadi atau sekelompok orang. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Sangat salah jika pemimpin negara demokrasi alih-alih berubah gaya seperti oligarki. Memimpin semuanya tanpa memikirkan kehendak rakyatnya seperti apa seharusnya jalannya pemerintahan itu. Secara sederhana oligarki adalah struktur pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang selalu mengendalikan kekuasaan untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri.

Oligarki cebrudng sebagai penyebab suatu negara semakin memburuk, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum. Hal ini terjadi karena oligarki mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok daripada rakyat. Justru di sini ada ketidakjujuran dalam menjalankan kepemimpinan model demokrasi tersebut.

Memang pemimpin yang sidiq sangat dibutuhkan, agar negara dapat memberi kesejahteraan bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk kepentingan rakyatnya sehingga bisa hidup sejahtera.

Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, tiga dari empat sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa siddiq (jujur).

Jujur (adil) berarti berkata dan bertindak dengan kejujuran, kebenaran, dan integritas. Seorang yang jujur adalah seseorang yang tidak berbohong, tidak menipu, dan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Jujur adalah sifat yang ditegaskan dan dianjurkan dalam ajaran Islam, dan dianggap sebagai salah satu ciri utama orang yang saleh.

Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Perintah jujur telah tercantum dalam Al Quran dan hadits. Salah satunya dalam Al Ahzab ayat 70, Artinya: "Hai orang-orang yang beriman,

Dari Halaman 1

Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (12/1). Menurutnya, DHS ditangkap dan jadi tersangka karena meminta uang kepada sejumlah peserta seleksi PPPK. "Meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi," katanya.

Namun, hingga kini polisi belum mengungkap jumlah uang yang ditagih DHS pada peserta PPPK Madina tersebut. Kombes Hadi mengaku, pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut.

"Nanti saja, masih didalami penyidik," sebutnya. Terkait berapa orang peserta seleksi PPPK yang diperas dan diminta uang, Hadi juga belum menjelaskan.

"Terkait seleksi Kompetensi PPPK itu dugaannya, terkait dengan jabatan fungsional di Kabupaten Madina, tapi semuanya masih berproses, tim sekarang sedang bekerja mereka sedang mendalami ini semua," ujarnya.

Atas perbuatannya, kata Hadi, Dollar (DHS) dijerat Pasal 12 Huruf E Jo Pasal 11 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dikenakan Pasal 12 huruf E Jo Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

TAK SESUAI ADMINISTRASI

Dari Halaman 1

Ia mengapresiasi Polri yang telah bergerak cepat menangkap kasus tersebut.

"Pertama kita apresiasi terhadap kinerja Polri yang telah ungkap kasus ini, besar harapan kita Polri dapat mengungkap ancaman-ancaman yang lainnya dan sekaligus ungkap motif pelaku," kata Ari dilansir detikNews, Minggu (14/1/2024).

Ia juga menyebut Anies menginginkan pemilu berjalan damai tanpa permusuhan sehingga pengancam hendak menembak dirinya dapat dibina.

"Kedua, Pak Anies mengharapkan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai, tanpa perlu ada permusuhan, sehingga hal-hal yang bisa diselesaikan dengan pencegahan, pembinaan, maka sebaiknya ditempuh jalur itu saja dahulu," tutur dia.

Untuk itu, ia menginginkan agar kasus tersebut diselesaikan lewat restorative justice (RJ) serta meminta pengaman terhadap capres ditingkatkan ke depannya.

"Iya benar sekali (mendorong restorative justice), tapi tetap adanya peningkatan keamanan baik dari internal kami maupun oleh pihak keamanan Polri," sebut dia.

Menurutnya, jika pelaku sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, maka tidak perlu ada tindakan hukum terhadap pelaku.

"Tadi saya jelaskan di atas, karena menurut Pak Anies, berharap Pemilu ini dapat berjalan dengan damai, tanpa perlu ada permusuhan, jadi jika bisa dibina dan Tsk dapat mengakui kesalahannya dan menyesalin perbuatannya, maka tidak perlu men-

Polda Sumut..

Dari Halaman 1

Di tempat terpisah, Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution menyebutkan, ada enam peserta seleksi PPPK yang lulus yang tidak sesuai proses administrasi yang diduga terkait penangkapan Kadisdik Dollar Hafriyanto Siregar. "Hari ini kami mengklarifikasi, banyak hal yang ditanyakan. Kami sudah jelaskan. Termasuk poin, kita sudah melakukan upaya mengantisipasi adanya maladministrasi," kata Sukhairi di Kantor Ombudsman Sumut, Jumat (12/1).

"Sejauh ini ada 6 orang (peserta seleksi PPPK)," sebutnya.

Karena diduga ada kecurangan, kelulusan 6 peserta seleksi yang tak sesuai administrasi tersebut pun dibatalkan.

"Itu tidak terpublis dengan baik, bahwa inspektur yang kita perintahkan untuk melakukan verifikasi, beberapa administrasi ditemukan tidak sesuai. Itu lah yang sudah kita batalkan," sambungunya.

Ia menyatakan, proses verifikasi ulang yang dilakukan inspektorat masih berlangsung sampai saat ini. Jika ditemukan lagi ada yang tidak sesuai prosedur maka kelulusan peserta seleksi akan dibatalkan.

Dia juga menyebut kemungkinan jumlah peserta yang lulus PPPK tapi cacat administrasi akan bertambah. "Kalau keseluruhan, yang punya masalah, yang terindikasi, yang ditemukan alat bukti, itu akan dibatalkan," ucapnya.

Timnas AMIN...

Dari Halaman 1

jadi kasus hukum," kata dia.

"Semoga terhadap pelaku masih bisa dilakukan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang dituliskannya itu bisa berbahaya dan mengirring pesan yang salah kepada publik luas," kata Anies Baswedan melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (13/1).

Anies juga berterima kasih dan mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya karena telah menangkap pelaku.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri. Sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan kondusif dan damai," ujar Anies.

BUKAN PENDUKUNG PASLON

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan, pria berinisial AWK, 23 tahun, yang ditangkap karena mengancam capres nomor urut 1 Anies Baswedan, tidak berafiliasi dengan partai politik maupun pendukung paslon pada Pilpres 2024.

"Sampai dengan saat ini tidak ada terkait masalah itu (dukungan paslon lain), informasi awal," kata Sandi saat konferensi pers di Mabes Polri, Sabtu 13 Januari 2024.

Namun begitu, Sandi mengatakan, Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan AWK secara mendalam, untuk mengetahui secara detil apa motif dan alasannya melakukan pengancaman.

"Tim lagi mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kami informasikan berikutnya," kata Sandi.

Israel Lanjutkan...

Dari Halaman 1

genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza biasanya merupakan hal yang paling sulit dibuktikan. Namun, dia menekankan bahwa para pejabat dan militer Israel telah menunjukkan intensi tersebut.

"Para pemimpin politik Israel, komandan militer, dan orang-orang yang memegang posisi resmi telah secara sistematis dan eksplisit menyatakan niat mereka untuk melakukan genosida," ucap Ngucukaitobi.

"Pernyataan ini kemudian diulangi oleh tentara di Gaza saat mereka terlibat dalam penghancuran warga Palestina dan infrastruktur fisik Gaza," ujar Ngucukaitobi.

Ngucukaitobi kemudian menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 28 Oktober 2023. Kala itu, Netanyahu mendesak pasukan darat Israel yang bersiap memasuki Gaza untuk "mengingat apa yang telah dilakukan Amalek terhadap Anda".

"Ini mengacu pada perintah Tuhan dalam Alkitab kepada Saul untuk melakukan pembalasan terhadap penghancuran seluruh kelompok orang," ucapnya. "Bukti niat genosida tidak hanya mengerikan, tapi juga sangat banyak dan tidak dapat disangkal," ujar Ngucukaitobi.

Pada hari kedua persidangan, Israel membantah argumen-argumen yang diajukan Afsel. "Komponen kunci dari genosida, yaitu niat untuk menghancurkan orang, secara keseluruhan atau sebagian, sama sekali tidak ada," kata tim hukum pemerintah Israel, kepada panel hukum ICJ, dikutip laman Anadolu Agency.

"Apa yang Israel cari dengan beroperasi di Gaza bukanlah untuk menghancurkan masyarakat, namun untuk melindungi rakyatnya yang diserang dari berbagai front, dan melakukannya sesuai dengan hukum, bahkan ketika mereka menghadapi musuh yang tidak berperasaan," ujar tim hukum Israel.

Keputusan ICJ atas kasus ini nantinya bersifat mengikat. Namun kemampuan ICJ untuk mengekalkan atau menerapkan keputusannya sangat kecil. Lebih dari 23.800 warga Palestina di Gaza telah terbunuh sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 56 ribu orang. (rep/js)